

TATA KELOLA PENGEMBANGAN WISATA BENDUNGAN DI DESA JENGAN DANUM KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT

Albertus Yafet¹, Yahdi Qolbi²

Abstrak

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana tata kelola yang efektif untuk pengembangan wisata Bendungan di Desa Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan untuk mengetahui tantangan dan hambatan pengembangan wisata Bendungan di Desa Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat..Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi pada masing - masing variable yang di teliti. Analisis data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengembangan wisata Bendungan Jengan Danum di Desa Jengan Danum Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat menunjukkan adanya upaya strategis pemerintah desa dalam memanfaatkan aset lokal menjadi potensi wisata bernilai ekonomi dan sosial. Namun, kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat menyebabkan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan belum optimal. Struktur kelembagaan yang belum jelas, keterbatasan dana, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga membuat pengelolaan wisata belum terintegrasi. Meskipun pembangunan fisik seperti titian dan gazebo telah dilakukan, aspek pemberdayaan dan pelibatan masyarakat masih lemah. Tantangan utama datang dari keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran, serta kurangnya komunikasi dan transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat yang menghambat efektivitas pengembangan ekowisata secara menyeluruh.

Kata Kunci : pembangunan, pariwisata, tata kelola

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi pasca pandemi menjadi fokus utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, sektor pariwisata memainkan peran penting sebagai katalis pemulihan ekonomi nasional. Pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat transformasi sosial dan budaya masyarakat.

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: albertusyafet@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Irawati & Prasetyo (2025) menyatakan bahwa bisnis pariwisata berfungsi sebagai katalis transformasi budaya yang memengaruhi individu, kelompok, dan pola kognitif masyarakat. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor ini karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, keanekaragaman flora dan fauna, serta hasil budaya bernilai komersial yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia menunjukkan tren positif yang memberikan dampak luas bagi pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Menurut Lukito (2022), prospek pariwisata nasional sangat menjanjikan dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal serta nasional. Regulasi yang mengatur sektor pariwisata tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menekankan pentingnya pengembangan destinasi, strategi pemasaran yang efektif, serta kelembagaan pariwisata yang kuat. Selain itu, Setyanto & Rusmini (2023) menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus selaras dengan prinsip keberlanjutan melalui pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Dengan luas wilayah mencapai 6.168,22 kilometer persegi yang terbagi dalam 16 kecamatan, daerah ini menyimpan kekayaan wisata alam dan budaya yang beragam. Pemerintah daerah berkomitmen mengelola potensi tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kebijakan ini menjadi dasar koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengembangkan pariwisata secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan.

Salah satu destinasi wisata potensial di wilayah ini adalah Bendungan Jengan Danum yang terletak di Kecamatan Damai. Bendungan tersebut memiliki nilai sejarah, fungsi ekologis, dan panorama alam yang menarik, menjadikannya objek wisata yang layak dikembangkan. Selain menjadi sarana rekreasi, bendungan ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir, penyimpan air hujan, serta sumber irigasi bagi lahan pertanian sekitar. Dengan pengelolaan yang baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, Bendungan Jengan Danum berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan bagi masyarakat setempat.

Namun, potensi besar tersebut belum termanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wisata. Berbagai penelitian (Trisdayanti & Kristiana, 2024; Uhai et al., 2024) menunjukkan bahwa hambatan utama mencakup keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan minimnya kegiatan promosi wisata. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi masyarakat lokal menyebabkan partisipasi mereka dalam kegiatan wisata masih rendah. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa akses jalan menuju lokasi wisata masih buruk, fasilitas umum belum memadai, dan kegiatan promosi belum berjalan efektif. Akibatnya, pengelolaan Bendungan Jengan Danum belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, meskipun potensinya sangat besar untuk menjadi penggerak pembangunan desa secara berkelanjutan.

Kerangka Teori

Pembangunan

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berkelanjutan yang bertujuan mencapai keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Secara umum, pembangunan merujuk pada proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus untuk mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan masa sebelumnya (Rustan, 2019). Dalam konteks ini, pembangunan dipahami sebagai suatu usaha sadar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Musleh (2023), terdapat dua konsep pembangunan yang berbeda. Pertama, pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan aspek kuantitatif seperti produksi serta penggunaan sumber daya. Kedua, pembangunan yang berfokus pada transformasi sosial dan distribusi barang serta peningkatan interaksi antaranggota masyarakat. Konsep kedua lebih menekankan pada pembangunan sosial yang mengubah struktur masyarakat untuk mengurangi disparitas, meningkatkan kesetaraan, dan meratakan manfaat pembangunan secara adil bagi semua lapisan.

Sementara itu, Inayatullah dalam Wijaya (2015) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan menuju struktur masyarakat yang mampu mendukung pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan secara lebih efektif. Pembangunan juga memberikan masyarakat kendali yang lebih besar terhadap lingkungan, tujuan politik, dan pengendalian diri mereka sendiri, sehingga tercipta masyarakat yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Menurut Rahman et al. (2023), pembangunan adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh lembaga perencanaan pembangunan untuk menciptakan transformasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan ini, pembangunan dipahami sebagai upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, dengan menilai kesejahteraan tidak hanya dari pendapatan per kapita, tetapi juga dari pemerataan distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan penurunan pengangguran.

Manfaat pembangunan bagi masyarakat sangat luas. Ompusunggu (2018) menyebutkan bahwa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat meliputi penyediaan prasarana perhubungan seperti jalan, jembatan, dan bandara; prasarana pemasaran seperti gedung dan pasar; prasarana sosial seperti sekolah, rumah ibadah, dan puskesmas; serta prasarana produksi seperti saluran irigasi dan air bersih yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan utama untuk bersantai dan rekreasi, bukan untuk mencari nafkah. Menurut A. I. Suryani (2017), pariwisata melibatkan kepuasan berbagai keinginan dan menikmati pengalaman mengunjungi tempat lain. Secara etimologis, kata pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu *pari* yang berarti “banyak” atau “berkeliling”, dan *wisata* yang berarti “pergi” atau “berpergian”. Berdasarkan hal tersebut, Widiyatmaja (2017) mengartikan pariwisata sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 tentang Kepariwisataan, pariwisata meliputi serangkaian kegiatan yang difasilitasi oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh individu, dunia usaha, dan pemerintah. Sementara itu, Fandeli (2014) menjelaskan bahwa pariwisata mencakup seluruh aspek dan usaha yang berkaitan dengan industri pariwisata, baik perjalanan yang dilakukan sekali maupun berulang kali ke berbagai tempat dengan tujuan tertentu.

Pariwisata juga merupakan kegiatan yang dinamis dan melibatkan banyak individu, baik secara mandiri maupun kelompok, yang dapat merangsang berbagai sektor ekonomi. Menurut Isdarmanto (2017), pariwisata adalah kegiatan multifaset yang mencakup banyak pemangku kepentingan dan aspek kehidupan. Aktivitas ini muncul dari interaksi antara wisatawan, komunitas lokal, pemerintah, pengusaha, dan lembaga terkait, serta berfungsi untuk mendorong pemerataan peluang usaha dan mengatasi tantangan sosial yang muncul akibat perubahan lokal, nasional, dan global.

Dalam melakukan perjalanan wisata, selalu terdapat faktor pendorong dan penarik yang memengaruhi keputusan seseorang untuk berwisata. Menurut Addin (2014), faktor pendorong berkaitan dengan motivasi sosial dan psikologis seseorang, sedangkan faktor penarik berkaitan dengan karakteristik dan daya tarik destinasi itu sendiri. Kombinasi antara kedua faktor tersebut berperan penting dalam menentukan pilihan lokasi wisata.

Tata Kelola

Tata kelola, sebagaimana didefinisikan oleh Bank Dunia, mengacu pada pengelolaan pembangunan yang efektif dan bertanggung jawab dengan berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Tujuan utama tata kelola adalah mencegah kesalahan alokasi dana investasi, memerangi korupsi politik maupun administratif, menegakkan disiplin anggaran, serta membangun kerangka hukum dan politik yang mendorong pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, tata kelola menjadi instrumen penting untuk memastikan proses pembangunan berjalan adil, efisien, dan transparan.

Konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) mencakup prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian integral dari pemerintahan dan tidak dapat dipisahkan darinya. Walaupun terminologi mengenai tata kelola yang baik masih beragam dan belum memiliki standar yang seragam, berbagai definisi yang ada berupaya menganalisis esensi pengelolaan yang efektif. Agustina, Muchsin, dan Suyeno (2021) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik berarti tindakan mengelola dan mengawasi urusan publik secara bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, tata kelola dapat diartikan sebagai sistem dan proses yang digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, serta memastikan suatu organisasi atau kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pariwisata, tata kelola mencakup pengaturan dan pengelolaan sumber daya, baik alam, manusia, maupun budaya, agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik di bidang pariwisata berfungsi untuk

menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Prinsip-prinsip utama tata kelola pariwisata meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan responsivitas terhadap kebutuhan semua pemangku kepentingan. Tata kelola yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Dengan sinergi yang kuat antar pihak, pembangunan pariwisata dapat berlangsung secara inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan manajemen sebagai proses mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan dengan mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, tata kelola bukan hanya sebatas pengawasan administratif, melainkan juga mencakup proses pengambilan keputusan, pelaksanaan strategi, dan evaluasi hasil dalam kerangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Menurut Ulfayani (2018), terdapat empat langkah utama dalam tata kelola, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Tahap perencanaan merupakan proses menentukan arah dan strategi berdasarkan informasi faktual yang akurat. Dalam konteks ini, perencanaan melibatkan kemampuan untuk memprediksi masa depan dan memilih alternatif terbaik guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tata kelola dalam pengembangan wisata bendungan di Desa Jengan Danum Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat

Tata kelola merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “to manage” yang mencakup kegiatan pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses mengatur dan melaksanakan berbagai tugas dengan mengarahkan sumber daya tambahan. Ini juga melibatkan pemberian dukungan dalam penerapan kebijakan organisasi dan mencapai tujuan. Tata kelola merupakan sebuah prosedur sebagai mekanisme yang mengawasi pelaksanaan kebijakan dan tujuan di segala bidang (Ulfayani 2018).

Planning (perencanaan)

Perencanaan (*Planning*) merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses tata kelola pembangunan karena menentukan arah dan keberhasilan program yang akan dijalankan. Menurut Ulfayani (2018), perencanaan melibatkan pemilihan dan pertimbangan yang cermat atas informasi faktual, peningkatan kemampuan memprediksi masa depan, serta pembentukan gambaran mental yang jelas terhadap tindakan yang akan dilakukan. Dalam konteks pengembangan wisata, perencanaan menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis agar kegiatan berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Jengan Danum, Bapak Kabak (5 Mei 2025), inisiatif awal perencanaan pengembangan wisata bendungan berawal dari keprihatinan terhadap kondisi bendungan yang mulai tidak terawat

akibat menurunnya aktivitas pertanian di sekitarnya. Ia menjelaskan bahwa ide pembangunan gazebo dan titian muncul agar bendungan tetap terpelihara dan dimanfaatkan secara positif. Pemerintah desa berharap langkah ini dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghadirkan ruang rekreasi bagi masyarakat.

Pembangunan Bendungan Jengan Danum sendiri dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2001 untuk mendukung sistem irigasi pertanian di wilayah Desa Jengan Danum. Namun, pemanfaatannya hanya berlangsung hingga tahun 2004 karena hasil panen padi yang rendah menyebabkan petani enggan melanjutkan aktivitas bercocok tanam. Akibatnya, bendungan menjadi terbengkalai dan tidak difungsikan sesuai tujuan awalnya sebagai sumber irigasi utama bagi lahan pertanian masyarakat desa.

Menyadari potensi alam yang dimiliki bendungan—khususnya keberadaan danau dan keindahan lingkungannya—Pemerintah Desa Jengan Danum pada tahun 2021 mengambil inisiatif untuk mengalihfungsikan area tersebut menjadi kawasan wisata. Tujuan utama langkah ini tidak hanya menjaga kelestarian bendungan agar tetap bersih dan terpelihara, tetapi juga sebagai bentuk inovasi dalam memanfaatkan aset desa yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber daya ekonomi baru yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan rencana anggaran pembelanjaan Desa Jengan Danum, terdapat dua kegiatan utama dalam tahap awal pengembangan, yakni pembangunan gazebo berukuran 10 x 10 meter dengan anggaran sebesar Rp156.965.000, serta pembangunan jembatan titian sepanjang 100 meter dengan anggaran sebesar Rp109.082.000. Pembangunan gazebo dimaksudkan sebagai fasilitas tempat istirahat pengunjung, sedangkan jembatan titian berfungsi sebagai jalur akses utama di kawasan wisata. Material yang digunakan sebagian besar berasal dari kayu ulin dan meranti, menunjukkan perhatian pemerintah desa terhadap kualitas, ketahanan, serta keselarasan bangunan dengan lingkungan alami di sekitarnya.

Namun, beberapa kendala muncul dalam proses perencanaan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT 06, Bapak Antonius (28 Juli 2025), diketahui bahwa perencanaan belum melibatkan semua elemen masyarakat. Ia mengaku tidak pernah diundang atau diberi laporan resmi mengenai pembangunan wisata tersebut, bahkan baru mengetahui adanya proyek setelah melihat langsung ke lokasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan perwakilan masyarakat di tingkat bawah, padahal keterlibatan RT penting agar informasi dapat tersampaikan ke warga secara luas.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengembangan wisata Bendungan Jengan Danum telah menunjukkan inisiatif strategis pemerintah desa dalam mengubah aset tidak produktif menjadi potensi wisata yang bernilai sosial dan ekonomi. Namun, kelemahan pada aspek koordinasi, transparansi, dan partisipasi publik menjadi tantangan utama yang harus diperbaiki. Jika pemerintah desa mampu memperkuat komunikasi dan melibatkan semua pihak sejak tahap perencanaan, maka program ini berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan implementasi praktis pengelolaan sumber daya manusia dan non-manusia agar strategi yang dipilih dapat dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Ulfayani (2018), tugas pengorganisasian menyatukan individu, perangkat, serta otoritas dalam satu kesatuan yang bergerak serasi, dipandu oleh strategi yang telah ditetapkan. Dalam konteks desa, pengorganisasian menjadi fondasi pelaksanaan program pembangunan, termasuk dalam pengembangan potensi wisata sebagai sumber ekonomi baru masyarakat.

Di tingkat Desa Jengan Danum, Sekretaris Desa Presyadi (Wawancara, 5 Mei 2025) menegaskan peran strategis sekretariat dalam menopang kebijakan wisata bendungan. Sekretariat bertanggung jawab mengelola dokumen perencanaan dan pelaporan, menyusun serta mengarsipkan kebijakan, kesepakatan warga, dan hasil musyawarah, serta memastikan legalitas dan kelengkapan administrasi kerja sama dengan pihak ketiga seperti investor, LSM, maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, sekretariat berfungsi sebagai penghubung administratif yang menjamin keteraturan proses dan keberlanjutan program.

Dari sisi BUMKA, Ketua BUMKA Alensius (Wawancara, 5 Mei 2025) menyampaikan bahwa hingga kini belum ada kegiatan konkret karena keterbatasan dana serta belum adanya penyerahan formal pengelolaan objek wisata dari pemerintah desa. Kondisi tersebut menyebabkan rencana pengembangan tidak dapat diturunkan menjadi program operasional. Padahal, secara kelembagaan, BUMKA seharusnya menjadi motor pengelolaan usaha desa sekaligus simpul komersialisasi potensi wisata yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat.

BPD melalui Pendi Nasri (Wawancara, 28 Juli 2025) mengemukakan bahwa pengorganisasian di bidang wisata belum memiliki arah yang jelas. Struktur kelembagaan khusus belum terbentuk, kelompok kerja belum ditetapkan, musyawarah lintas unsur (Pemerintah Desa, LPM, karang taruna, kelompok masyarakat) belum terlaksana, dan kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, serta sarana prasarana masih minim. Fungsi pengawasan BPD sejauh ini baru sebatas memastikan kesesuaian pembangunan dengan RAB, belum menyentuh tata kelola operasional destinasi wisata.

Pada tingkat basis, Ketua RT 06 Antonius (Wawancara, 28 Juli 2025) menyebut bahwa peran RT masih sangat terbatas. Ia belum pernah diberitahu adanya tim atau struktur khusus dan kerap baru mengetahui kegiatan setelah pekerjaan berjalan atau selesai. Minimnya kanal informasi membuat RT sulit menyalurkan aspirasi warga serta mengorganisir partisipasi mereka sejak tahap perencanaan. Akibatnya, potensi dukungan sosial dari warga belum teraktivasi secara optimal.

Dari perspektif warga, Heri (Wawancara, 28 Juli 2025) menilai pelibatan kelompok masyarakat seperti pemuda, ibu-ibu, dan tokoh adat belum jelas. Pembagian peran dan tugas belum tersosialisasi dengan baik, sementara relasi kerja antara Pemerintah Desa dan BPD belum sinkron sehingga rapat kerap melahirkan persoalan baru. Ia juga belum pernah mendengar adanya pelatihan atau sosialisasi pengelolaan wisata bagi warga, yang menunjukkan lemahnya skema pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan wisata desa.

Soal promosi, Dulin (Wawancara, 5 Mei 2025) menilai keterlibatan warga “hampir nol” karena informasi program wisata belum tersebar merata. Ia menyarankan agar dilakukan penataan dasar terlebih dahulu—meliputi pembersihan area, percantikan lingkungan, dan perbaikan akses—sebelum promosi dilakukan secara luas, misalnya melalui media sosial atau kegiatan desa. Tanpa infrastruktur dan tata kelola minimal, promosi berisiko tidak efektif. Secara keseluruhan, pengorganisasian pengembangan wisata bendungan di Desa Jengan Danum belum optimal. Diperlukan pembentukan struktur kelembagaan yang jelas, penyerahan mandat formal kepada BUMKA, musyawarah lintas lembaga yang rutin, pelatihan bagi warga, serta pembenahan sarana prasarana sebagai prasyarat promosi agar potensi wisata dapat berkembang menjadi sumber PAD dan kesejahteraan desa secara berkelanjutan.

Actualiting (Penggerak/ Pelaksana)

Penggerak merupakan serangkaian kegiatan komprehensif yang bertujuan untuk memotivasi anggota organisasi agar bersedia menyumbangkan upaya menuju pencapaian tujuan bersama. Menurut Ulfayani (2018), fungsi penggerak identik dengan tindakan nyata seorang manajer dalam melancarkan dan mempertahankan aktivitas organisasi agar berjalan efektif. Dalam konteks pengembangan wisata, fungsi ini diwujudkan melalui upaya pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat, membangun semangat kerja kolektif, dan menggerakkan seluruh potensi yang ada guna mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Jengan Danum telah menunjukkan langkah awal pelaksanaan fungsi penggerak melalui pembangunan fasilitas penunjang seperti titian kayu dan gazebo. Berdasarkan wawancara dengan Petinggi Desa Jengan Danum, Bapak Kabak (5 Mei 2025), pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai fasilitas awal untuk mendukung kenyamanan pengunjung sekaligus menjaga kelestarian bendungan. Fasilitas ini menjadi simbol tindakan nyata pemerintah desa dalam menggerakkan potensi wisata lokal agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, menurut Ketua BPD, Bapak Pendi Nasri (Wawancara, 28 Juli 2025), kegiatan pengembangan wisata baru sebatas tahap awal, seperti pembersihan area, pembangunan titian, dan pembuatan gazebo. BPD berperan memastikan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta kondisi di lapangan. Meskipun masyarakat menunjukkan antusiasme karena adanya peluang usaha, keterbatasan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADK) menyebabkan proyek tertunda. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi penggerak pemerintah desa belum sepenuhnya efektif karena belum mampu memotivasi dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada.

Keterlibatan masyarakat juga masih rendah, sebagaimana disampaikan oleh Ketua RT 06, Bapak Antonius (Wawancara, 28 Juli 2025). Ia menuturkan bahwa warga RT 06 tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pembangunan dan koordinasi dari pemerintah desa pun minim. Ia bahkan sering kali baru mengetahui adanya proyek setelah pekerjaan selesai. Kondisi ini menggambarkan lemahnya komunikasi dan koordinasi vertikal antara pemerintah desa dan struktur masyarakat

di bawahnya, padahal RT memiliki peran strategis dalam menggerakkan partisipasi warga.

Pandangan serupa diungkapkan oleh Bapak Heri (Wawancara, 28 Juli 2025), yang menilai bahwa meskipun sudah ada hasil pembangunan fisik seperti titian dan gazebo, partisipasi masyarakat masih sangat minim. Ia menegaskan kesiapannya untuk terlibat jika diberi kesempatan, namun sebagai warga biasa, ruang partisipasi belum terbuka. Lebih lanjut, ia juga menyoroti dampak negatif dari kurangnya pengawasan, di mana lokasi wisata sering disalahgunakan oleh anak-anak untuk kegiatan yang tidak bermanfaat seperti minum-minum. Hal ini menandakan bahwa pembangunan fisik tanpa pengelolaan dan pengawasan sosial dapat berpotensi menimbulkan masalah baru.

Sementara itu, Bapak Dulin (Wawancara, 5 Mei 2025) menilai kondisi infrastruktur wisata masih sangat minim. Fasilitas umum seperti titian dan gazebo belum memadai untuk mendukung aktivitas wisata secara berkelanjutan. Minimnya infrastruktur tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengunjung tetapi juga membatasi potensi ekonomi warga di sekitar bendungan. Ia menekankan bahwa pengembangan wisata seharusnya tidak berhenti pada pembangunan awal, melainkan disertai peningkatan fasilitas, pelibatan masyarakat, dan promosi yang lebih luas agar manfaatnya dapat dirasakan bersama.

Berdasarkan temuan penelitian, fungsi *actualizing* atau penggerak di Desa Jengan Danum masih berjalan terbatas. Pemerintah desa memang telah mengambil tindakan nyata berupa pembangunan infrastruktur dasar, namun belum disertai strategi komprehensif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. BPD masih berfokus pada pengawasan administratif, sedangkan Ketua RT dan warga belum dilibatkan secara aktif. Keterbatasan dana dan lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi fungsi penggerak dalam pengembangan wisata bendungan.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi penggerak di Desa Jengan Danum belum bisa dikategorikan sebagai kegagalan, melainkan belum optimal. Pemerintah desa telah menunjukkan inisiatif nyata, namun masih terbatas pada aspek fisik. Agar pengembangan wisata bendungan berhasil, dibutuhkan strategi pergerakan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan—melalui pelibatan masyarakat sejak awal, peningkatan koordinasi antarstruktur desa, dan penguatan motivasi kolektif. Dengan langkah tersebut, potensi wisata bendungan dapat berkembang menjadi sumber kesejahteraan dan kebanggaan bersama bagi masyarakat Desa Jengan Danum.

Tantangan dan hambatan dalam pengembangan wisata Pemerintah Desa

Tantangan dan hambatan dalam pengembangan wisata, khususnya ekowisata di Indonesia, mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan kompleks. Menurut Mu'tashim & Indahsari (2021), kendala utama meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan, minimnya partisipasi aktif masyarakat lokal, serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang. Infrastruktur jalan menuju lokasi wisata di banyak daerah masih buruk, transportasi umum belum memadai, dan fasilitas konservasi belum berjalan optimal. Rendahnya tingkat keamanan di

beberapa destinasi turut menjadi faktor penghambat yang menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung.

Dalam konteks Desa Jengan Danum, tantangan teknis di lapangan terlihat pada proses pembangunan dan pemeliharaan fasilitas wisata. Berdasarkan dokumentasi lapangan (5 Mei 2025), pembangunan gazebo dan titian di atas air menjadi sulit akibat kondisi air yang fluktuatif serta keterbatasan bahan bangunan. Menurut Petinggi Desa Jengan Danum, penggunaan kayu ulin sebagai material utama merupakan keharusan karena daya tahannya di air, namun bahan ini mahal dan sulit diperoleh di wilayah Kutai Barat. Tiang-tiang penyangga yang tidak stabil juga menambah kompleksitas dan biaya pembangunan, menjadikan proses ini lambat dan tidak efisien.

Kerusakan bendungan akibat penurunan struktur tanah menjadi hambatan besar bagi keberlanjutan wisata. Kerusakan tersebut menyebabkan penurunan volume air dan berkurangnya daya tarik wisata. Meski pemerintah desa berencana memperbaiki bendungan, biaya yang dibutuhkan sangat besar, sedangkan Dana Desa tidak mencukupi untuk membiayai seluruh perbaikan. Akibatnya, proses pemulihan belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Kondisi ini juga membuat pemerintah desa belum dapat menyerahkan pengelolaan wisata kepada BUMKA. Ketua BUMKA, Alensius, menegaskan bahwa selain keterbatasan dana, lembaga ini masih membutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar mampu mengelola wisata secara profesional.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kerusakan fisik fasilitas wisata turut memperburuk kondisi destinasi. Akses jalan menuju bendungan hampir tertutup tumbuhan liar, gazebo dan jamban rusak, serta tanggul dan pondasi bendungan mengalami keretakan serius. Penurunan volume air menyebabkan danau dipenuhi tanaman liar sehingga fungsinya sebagai tempat rekreasi menurun. Dampaknya, kunjungan wisatawan berkurang drastis, dan potensi ekonomi yang sebelumnya muncul dari aktivitas memancing atau rekreasi tidak lagi berkembang.

Selain aspek teknis dan pendanaan, hambatan besar juga muncul dari lemahnya komunikasi dan koordinasi antarstruktur pemerintahan desa. Berdasarkan wawancara dengan Ketua RT 06, Antonius (28 Juli 2025), pihak RT jarang dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program wisata, bahkan sering tidak menerima informasi tentang kegiatan pembangunan. Minimnya transparansi ini menghambat peran RT sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, yang berakibat pada rendahnya partisipasi warga. Oleh karena itu, strategi terpadu diperlukan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan seperti BUMKA, serta melibatkan masyarakat secara aktif agar pengembangan ekowisata di Desa Jengan Danum dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Masyarakat

Masyarakat lokal menghadapi berbagai tantangan yang menjadi hambatan tersendiri bagi keberlanjutan dan efektivitas program wisata di Desa Jengan Danum. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata.

Ketua BUMKA menjelaskan bahwa hingga kini belum ada kegiatan konkret yang dijalankan karena keterbatasan dana serta belum adanya penyerahan resmi pengelolaan wisata dari pemerintah desa kepada BUMKA. Kondisi ini menunjukkan keterlambatan dalam pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan wisata, sehingga potensi lokal belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Bapak Heri (Wawancara, 28 Juli 2025), pemerintah desa belum menunjukkan keseriusan dalam mengelola wisata bendungan. Ia menilai program yang dijalankan masih bersifat formalitas tanpa semangat dan visi pembangunan yang jelas. Padahal, dengan adanya dukungan dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Alokasi Dana Kampung (ADK), seharusnya pengembangan wisata dapat dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa apabila pemerintah desa memiliki semangat membangun dan melibatkan masyarakat secara aktif, maka pengembangan wisata tidak hanya akan memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.

Lebih lanjut, Bapak Heri juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur bendungan yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Ia menyarankan agar pemerintah desa tidak hanya bekerja sama dengan lembaga internal seperti BPD, tetapi juga menggandeng pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memperoleh dukungan teknis dan pendanaan yang lebih kuat. Upaya memperbaiki struktur fisik bendungan, menutup lubang, menjaga kestabilan air, dan mengendalikan pertumbuhan rumput di area wisata dinilai penting tidak hanya untuk meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga untuk menjaga fungsi bendungan sebagai sumber air masyarakat.

Sementara itu, Bapak Dulin (Wawancara, 5 Mei 2025) menambahkan bahwa minimnya komunikasi dan musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi tantangan besar lainnya. Warga sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk berpartisipasi, tetapi jarang mendapatkan informasi atau undangan resmi untuk rapat desa. Kurangnya transparansi dan koordinasi membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ia berharap pemerintah desa lebih sering mengadakan pertemuan khusus membahas program wisata, menyampaikan tujuan serta rencana jangka panjang secara terbuka, dan menjadwalkan kegiatan gotong royong agar warga dapat berkontribusi sesuai kemampuan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama pengembangan wisata bendungan di Desa Jengan Danum terletak pada minimnya partisipasi aktif masyarakat dan lemahnya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga. Kurangnya pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan menimbulkan rendahnya rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan, sementara keterbatasan visi dan strategi pemerintah desa memperparah kesenjangan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi partisipatif yang menekankan transparansi, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta pemberdayaan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, pengembangan wisata bendungan tidak hanya akan meningkatkan perekonomian desa, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan potensi wisata lokal.

Kesimpulan dan Rekomendasi

kesimpulan

1. Planning (Perencanaan)

Pemerintah desa berupaya memanfaatkan Bendungan Jengan Danum sebagai potensi wisata bernilai ekonomi dan sosial. Namun, kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat membuat perencanaan belum efektif. Keberhasilan pengembangan sangat bergantung pada keterlibatan warga sejak awal.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian belum berjalan optimal. Koordinasi antar lembaga, peran BUMKA, dan partisipasi masyarakat masih lemah. Keterbatasan dana dan struktur kelembagaan yang belum jelas menghambat pengelolaan wisata secara terpadu.

3. Actualizing (Pelaksanaan)

Pembangunan fasilitas seperti titian dan gazebo sudah dimulai, tetapi fokus masih pada fisik. Pemberdayaan dan motivasi masyarakat belum berjalan baik, sementara koordinasi antar lembaga masih lemah.

Tantangan dan Hambatan

1. Pemerintah Desa

Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, infrastruktur, anggaran, dan koordinasi. Pemeliharaan bendungan dan akses jalan sulit dilakukan karena biaya tinggi dan rendahnya keterlibatan warga.

2. Masyarakat

Warga kurang dilibatkan dalam proses pengembangan wisata. Minimnya komunikasi dan transparansi dari pemerintah desa menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan hasil pembangunan.

Rekomendasi

1. Perlu adanya perencanaan partisipatif dan transparan dengan melibatkan masyarakat sejak awal, disertai pemetaan potensi dan penyusunan roadmap jangka pendek, menengah, hingga panjang.
2. Perlu adanya kelembagaan pengelola wisata yang jelas dan terstruktur melalui BUMDes/BUMKA atau Pokdarwis, dengan koordinasi lintas lembaga dan tokoh masyarakat yang terjadwal secara rutin.
3. Perlu adanya pemberdayaan dan pendidikan sadar wisata bagi masyarakat melalui pelatihan pemanduan, kuliner, kerajinan, homestay, serta pemahaman menjaga kelestarian lingkungan.
4. Perlu adanya diversifikasi atraksi dan inovasi program wisata yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengembangkan kegiatan budaya, ekowisata, serta peluang usaha masyarakat.
5. Perlu adanya kolaborasi dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten, pihak swasta, dan lembaga eksternal, termasuk inovasi sumber pendanaan serta gotong royong dalam pemeliharaan infrastruktur.

Daftar Pustaka

Addin, M. (2014). Strategi pengembangan wisata spiritual di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 9(2), 121–131.

- Agustina, H. A., Muchsin, S., & Suyeno. (2021). Tata kelola pengembangan objek wisata bahari Tlocor dalam menarik wisatawan domestik (Studi kasus wisata bahari Tlocor Dusun Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Respon Publik*, 15(1), 8–13.
- Fandeli, C. (2014). *Dasar-dasar manajemen kepariwisataan alam*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Irawati, N., & Prasetyo, H. (2025). *Pariwisata berkelanjutan* (Vol. 17, p. 302).
- Lukito, L. E. (2022). Kontribusi industri pariwisata terhadap pembangunan indeks manusia.
- Mu'tashim, M. R., & Indahsari, K. (2021). Pengembangan ekowisata di Indonesia. *Jurnal Usahid Solo*, 1(1), 295–308. <https://jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/SENRIABDI/article/view/863/652>
- Musleh, M. (2023). Tata kelola wisata Pulau Gili Iyang: Perspektif community based tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42–50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.2023.42-50>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Rustan. (2019). *Pembangunan ekonomi*.
- Suryani, A. I. (2017). Strategi pengembangan pariwisata lokal. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terdapan Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi*, 3(1), 28–38.
- Ulfayani, R. (2018). Sistem pengelolaan pariwisata Taman Nasional terhadap kesejahteraan masyarakat Je'ne Taesa di Kabupaten Maros (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar).
- Widiyatmaja, I. G. N. (2017). *Pengetahuan dasar ilmu pariwisata*. Denpasar: Bali Publishing.
- Setyanto, T. J., & Rusmini, A. (2023). Perempuan pemimpin: Membingkai pariwisata budaya melalui kuliner sehat dan berkelanjutan. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 75–88. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.45>